

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah proses pengelolaan kebijakan, program, dan pelayanan publik oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut Chandler dan Plano dalam Asharri & Astuti, (2019), adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, administrasi publik adalah seni dan ilmu yang dirancang untuk mengelola urusan publik dan melakukan berbagai tugas yang ditentukan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Administrasi publik adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kebijakan, dan layanan publik yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan serta aparatur negara. Proses ini bertujuan untuk mengelola urusan-urusan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan administrasi kependudukan. Dalam administrasi publik, peran aktor pemerintahan sangat penting dalam

menjamin bahwa setiap kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial yang terjadi.

Pelaksanaan administrasi publik harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan efisiensi menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan. Sementara itu, akuntabilitas menjadi landasan moral dan hukum yang memastikan bahwa kebijakan dan layanan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, administrasi publik berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan kepada warga negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.2 Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi merujuk pada interaksi dan hubungan yang terbentuk antara individu, kelompok, maupun organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, kolaborasi mencakup elemen-elemen penting seperti komunikasi, koordinasi, pembagian tugas, serta pengelolaan konflik. Komunikasi yang terbuka dan transparan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan antarpihak, sementara koordinasi dibutuhkan untuk mengatur dan menyelaraskan aktivitas agar semua pihak bergerak ke arah yang sama. Penetapan peran dan tanggung

jawab secara jelas juga sangat penting untuk mencegah tumpang tindih tugas, sekaligus memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Kendati demikian, konflik tetap berpotensi muncul, sehingga dibutuhkan kemampuan dalam menyelesaikannya secara konstruktif agar hubungan antarpihak tetap harmonis dan tujuan kolaborasi dapat tercapai.

Selain menjaga efektivitas kerja sama, kolaborasi juga menjadi wadah lahirnya inovasi dan kreativitas, karena mempertemukan berbagai latar belakang keahlian dan sudut pandang. Proses ini memungkinkan terbentuknya solusi yang lebih tepat dan relevan terhadap permasalahan bersama. Untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas kolaborasi, evaluasi berkala melalui umpan balik dari seluruh pihak terlibat sangat diperlukan. Evaluasi ini bertujuan memperbaiki proses maupun hasil kerja sama di masa mendatang. Aspek keberlanjutan menjadi semakin penting, terutama agar hubungan kolaboratif tetap terjaga bahkan setelah tujuan awal berhasil dicapai.

Dalam konteks industri kreatif seperti batik, dinamika kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku industri memainkan peran krusial dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan produk. Kolaborasi ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan inovasi desain, penyusunan strategi pemasaran, hingga perluasan akses pasar. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, kolaborasi menjadi semakin penting ketika penyelesaian masalah publik tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja, melainkan memerlukan keterlibatan

berbagai pihak lintas sektor. Ansell dan Gash (2008) menyebut proses ini sebagai *collaborative governance*, yaitu suatu bentuk tata kelola di mana lembaga pemerintahan secara langsung melibatkan aktor-aktor non-pemerintah dalam forum formal untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan melalui pengambilan keputusan berbasis konsensus. Mereka menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah seperti komunitas lokal, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

Dalam konteks pengembangan industri batik di Blitar, pendekatan ini sangat relevan, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi tidak dapat ditangani secara sepihak. Pemerintah membutuhkan kolaborasi yang erat dengan komunitas batik untuk menyusun program pelatihan, membuka akses terhadap teknologi, serta memperluas jaringan pemasaran. Ansell dan Gash (2008) mengidentifikasi empat elemen utama dalam kolaborasi yang efektif, yaitu:

1. Kondisi awal (*starting conditions*) seperti ketimpangan kekuasaan dan sejarah hubungan antarpihak,
2. Desain institusional yang menjamin keterbukaan dan kesetaraan,
3. Kepemimpinan fasilitatif yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga inklusivitas, serta
4. Proses kolaboratif yang melibatkan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, pemahaman bersama, komitmen kolektif, hingga pencapaian hasil yang disepakati bersama.

Keempat elemen tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan kolaborasi yang sinergis, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan industri batik sebagai bagian dari ekonomi kreatif daerah.

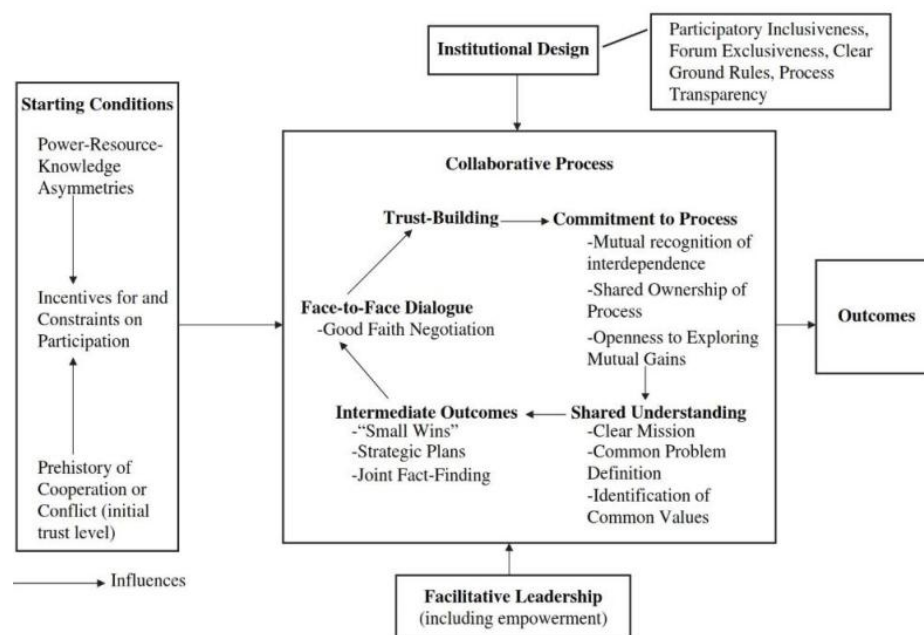
2.1.2.1 Collaborative governance

Collaborative governance dalam konteks administrasi negara, menurut Ansell & Gash, (2008), adalah suatu proses dan struktur tata kelola yang mengikutsertakan aktor-aktor dari sektor publik, privat, dan masyarakat sipil untuk secara kolektif membuat keputusan kebijakan publik melalui forum bersama yang *deliberatif* dan *Consensus-oriented*. Pelaksanaan *collaborative governance* bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme tata kelola yang memungkinkan lembaga pemerintah dan aktor non-negara terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan publik yang bersifat formal, *deliberatif*, dan *Consensus-oriented*. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk menciptakan forum bersama di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk berdiskusi, membangun pemahaman bersama, serta membuat keputusan yang mencerminkan kepentingan kolektif. Dengan demikian, *collaborative governance* tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

2.1.2.2 Model Collaborative

Gambaran relitas yang disederhanakan dari model dapat disimpulkan dan kemudian disajikan dalam derajat dan struktur yang dapat digunakan sebagai aplikasi teori. Model Collaborative governance muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah publik, sehingga membutuhkan berbagai aktor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008) digambarkan tentang kajian variabel utama yaitu terdiri dari : 1. Kondisi awal, 2. Desain kelembagaan, 3. Kepemimpinan, 4. Proses kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008).

Gambar 2.1 Model Collaborative Ansell and Gash (2008)



Sumber : Ansell and Gash (2008)

Dalam model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell dan Gash, 2008) terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Kondisi awal

Kondisi ini dapat mendukung atau menghambat kerja sama antara pemangku kepentingan tersebut, dan antara lembaga dengan pemangku kepentingan, serta antar lembaga atau organisasi dengan pemangku kepentingan. Ada tiga variabel kondisi awal yaitu : ketidakseimbangan, pengaruh dan kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan, sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerja sama yang telah dilakukan atau konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan, bentuk dorongan dan kendala ikut berpartisipasi tentang kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan terdapat aturan dasar dalam berkolaborasi. Dalam desain kelembagaan merupakan partisipasi dalam kolaborasi, terbentuknya forum, aturan pelaksanaan yang jelas, dan transparansi proses pelaksanaan kolaborasi.

3. Kepemimpinan

Dalam berkolaborasi sering ataupun mungkin terjadi perselisihan dengan adanya tidakpercayaan antara stakeholder, akan tetapi dari sisi lain terdapat keinginan untuk ikut berpartisipasi, maka membutuhkan kepemimpinan yang dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan sebagai mediator didalam kolaborasi. Kepemimpinan harus dapat dipercaya dan dihormati oleh pemangku kepentingan yang dibutuhkan dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat biasanya muncul dari organisasi tersebut.

4. Proses Kolaboratif

a. Dialog tatap muka

Semua kolaborasi dibangun berdasarkan dialog antara pemangku kepentingan. Dialog ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membangun kesepakatan. Dialog antara pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa jika para pemangku kepentingan dapat bekerja sama, hal ini akan menciptakan situasi saling menguntungkan bagi mereka.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak bisa dipisahkan dari proses dialog. Pemimpin yang kolaboratif harus mampu menciptakan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Proses membangun kepercayaan merupakan proses jangka Panjang yang membutuhkan waktu dan membutuhkan banyak komitmen.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi

Kondisi saling ketergantungan yang tinggi antar pemangku kepentingan kemungkinan besar akan meningkatkan non-komitmen terhadap kerja sama. Perlu ditekankan bahwa kerja sama bukanlah perjanjian yang hanya dilakukan satu kali saja, melainkan proses kerja sama yang berkelanjutan dan sangat bermanfaat.

d. Pemahaman bersama

Pada titik tertentu, pihak-pihak yang terlibat harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang bisa

dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa tujuan bersama yang jelas mengenai permasalahan yang kita hadapi bersama, dan pemahaman bersama mengenai nilai yang dicapai melalui kolaborasi.

e. Hasil antara (pertengahan)

Jika hasil dan manfaat dari kolaborasi adalah nyata, kolaborasi kemungkinan besar akan terus berlanjut, meskipun hasil tersebut masih kecil sebagai hasil dari proses kolaborasi. Hasil kecil ini dapat menjadi kekuatan pendorong untuk membangun kepercayaan dan komitmen di antara pemangku kepentingan.

2.1.3 Governance

Konsep *governance* berkembang sebagai respons terhadap kelemahan model pemerintahan tradisional yang bersifat sentralistik dan birokratis. *Governance* menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis jejaring dalam proses pengambilan keputusan publik. Rhodes (1997) menjelaskan bahwa *governance* adalah “*self-organizing, inter-organizational networks characterized by interdependence, resource exchange, rules of the game, and significant autonomy from the state.*” Dengan kata lain, *governance* mencerminkan pola interaksi antar aktor negara dan non-negara yang saling tergantung dan berinteraksi dalam kerangka kerja jaringan (*network*). Dalam pandangan Sørensen dan Triantafillou (2013), *governance* adalah pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu politik, administrasi publik, sosiologi, ekonomi, dan

hukum, di mana kebijakan publik diproduksi melalui kolaborasi berbagai aktor, bukan oleh negara saja.

Sementara itu, World Bank Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, (2004) mendefinisikan *governance* sebagai “*the traditions and institutions by which authority in a country is exercised,*” termasuk dalam hal proses pemilihan, pemantauan, dan penggantian pemerintah, kemampuan pemerintah merumuskan dan menerapkan kebijakan, serta penghormatan terhadap lembaga yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Konsep ini kemudian diperkuat oleh Stoker (1998), yang menyatakan bahwa *governance* melibatkan berbagai lembaga dan aktor dari sektor publik maupun swasta, serta membantu menyelesaikan masalah sosial secara bersama melalui jaringan kebijakan (*policy networks*). Dengan demikian, teori *governance* menegaskan perlunya sinergi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam tata kelola publik yang efektif, responsif, dan berorientasi pada nilai publik (*public value*).

2.1.3.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai *entrepreneur* memiliki peran strategis dalam mendorong tumbuhnya wirausaha lokal melalui berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Salah satu bentuk nyata dari peran ini adalah pemberian bantuan dan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil perorangan, guna meningkatkan kapasitas usaha mereka. Ketika pelaku usaha mengalami kendala permodalan, pemerintah daerah dapat hadir melalui penyediaan akses

kredit dan subsidi, yang bertujuan untuk memperbesar peluang pengembangan usaha secara lebih berkelanjutan. Dengan kebijakan-kebijakan semacam ini, diharapkan para pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian daerah.

Peran pemerintah daerah dalam mendorong kewirausahaan tidak hanya berdampak pada individu pelaku usaha, tetapi juga memberi efek ganda pada ekonomi lokal. Dengan terciptanya wirausaha-wirausaha baru, akan muncul pula inovasi-inovasi dalam proses produksi yang berani mengambil risiko dan mencoba pendekatan baru dalam menjalankan usaha. Inovasi ini memungkinkan terbentuknya unit-unit usaha baru, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah entrepreneur di suatu daerah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Untuk memperkuat pertumbuhan ini, pemerintah daerah juga memiliki peran sebagai koordinator, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka desentralisasi. Kepala Administrasi Kabupaten, misalnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan, koordinasi, dan dukungan terhadap seluruh kegiatan pelayanan pemerintah di tingkat kabupaten, termasuk dalam pelaksanaan, implementasi, dan monitoring kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Fungsi koordinatif ini menjadi penting agar seluruh program pembangunan daerah berjalan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai entitas yang menjalankan otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bersifat lokal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lokal, termasuk sektor budaya seperti industri batik. Dalam konteks ini, peran pemerintah tidak hanya sebatas pada perumusan kebijakan, tetapi juga meliputi pemberian fasilitas, pelatihan, promosi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Khusus dalam pengembangan industri batik, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai penghubung antara komunitas batik dengan berbagai sumber daya pendukung mulai dari akses terhadap pelatihan dan teknologi, hingga pembukaan jaringan pasar yang lebih luas. Melalui kerja sama lintas sektor dan pendekatan kolaboratif, diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan ruang tumbuh yang sehat dan dinamis bagi pelaku industri batik, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas dari produk tersebut. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai entrepreneur dan koordinator tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga melestarikan warisan budaya bangsa.

2.1.4 Asosiasi

Asosiasi merupakan bentuk organisasi yang dibentuk oleh sekelompok individu, kelompok, atau badan usaha yang memiliki

kesamaan tujuan, kepentingan, atau bidang usaha tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asosiasi merupakan perkumpulan yang terdiri atas orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama; ikatan atau gabungan. Dalam konteks sosial, Soekanto (2007) menyebut asosiasi sebagai suatu bentuk hubungan sosial yang ditandai oleh adanya kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Tambunan (2015), keberadaan asosiasi dalam sektor UMKM dan ekonomi kreatif berperan signifikan dalam membangun jaringan usaha, mendorong inovasi, serta memperkuat akses pasar dan pembiayaan. Asosiasi dapat terdiri dari pelaku usaha, pekerja kreatif, atau komunitas yang memiliki latar belakang dan kepentingan serupa.

Asosiasi bersifat sukarela, namun memiliki struktur organisasi yang formal, serta memiliki fungsi sebagai wadah advokasi, komunikasi, dan pengembangan kapasitas anggota. Asosiasi memiliki peran penting dalam memperkuat posisi anggotanya baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, asosiasi berfungsi sebagai:

1. Wadah Koordinasi dan Kolaborasi: Asosiasi menjadi tempat bertemunya para pelaku dengan latar belakang serupa untuk bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi bersama.
2. Penyambung Kepentingan dengan Pemerintah: Asosiasi dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan, memberikan masukan program, serta menjembatani pelaku usaha dengan kebijakan publik.

3. **Fasilitator Peningkatan Kapasitas:** Asosiasi seringkali menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan promosi bagi anggotanya untuk meningkatkan daya saing.
4. **Advokasi dan Perlindungan:** Asosiasi dapat memperjuangkan kepentingan kolektif anggotanya dalam menghadapi tantangan pasar, regulasi, dan isu hukum.

2.4.1.1 Asosiasi dalam Konteks Industri Kreatif Batik

Dalam industri kreatif berbasis budaya seperti batik, asosiasi memainkan peran strategis sebagai penggerak kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah daerah. Keberadaan asosiasi batik, seperti Asosiasi Batik Blitar Asli (Ababil), menjadi wadah koordinasi pengrajin batik dalam mengakses pelatihan, promosi, serta memperjuangkan hak kekayaan intelektual. Asosiasi juga menjadi aktor kunci dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan mendorong regenerasi pengrajin muda. Penelitian oleh Sudarsono (2018) menunjukkan bahwa asosiasi batik di daerah berperan penting dalam mendukung keterlibatan pengrajin dalam berbagai program pemerintah, memperkuat jejaring usaha, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya inovasi serta kualitas produk.

2.1.5 Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang tumbuh berdasarkan ide, kreativitas, dan inovasi, serta berkontribusi terhadap pembentukan

nilai ekonomi dan budaya. Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2009) menyebutkan bahwa industri kreatif mencakup berbagai subsektor, termasuk kerajinan tangan dan desain, di mana batik berada di dalamnya. Industri ini mengandalkan kekuatan intelektual serta ekspresi budaya sebagai nilai jual utamanya. Sebagai bagian dari industri kreatif, batik tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Pengembangan industri batik sebagai sektor kreatif harus mengedepankan inovasi desain, peningkatan kualitas produksi, dan strategi pemasaran yang relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, Unctad (2010) mendefinisikan industri kreatif sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang mencakup siklus penciptaan, produksi, dan distribusi barang dan jasa yang menggunakan kreativitas dan kekayaan intelektual sebagai input utama. Industri ini mencakup subsektor seperti seni pertunjukan, musik, desain, arsitektur, kerajinan, hingga warisan budaya seperti batik. Unctad mengelompokkan industri kreatif dalam empat pilar utama: warisan budaya (cultural heritage), seni (arts), media (media), dan kreasi fungsional (functional creations). Kerangka ini memfokuskan pada peran industri kreatif dalam pembangunan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan langkah yang diambil oleh peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan ide-ide baru untuk penelitian yang akan datang. Dalam bagian ini, peneliti menyajikan ringkasan penelitian yang telah

dipublikasikan dan yang belum dipublikasikan yang berkaitan dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari penulis.

1. Penelitian oleh Oetari & Rosandini, (2021) membahas kolaborasi antara pemerintah daerah Blitar dan komunitas batik Desa Kembang Turi dalam mendorong inovasi desain batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pengembangan desain berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing batik Blitar.
2. Nurul Ratnawati dkk. (2022) meneliti pengembangan motif batik Reyog Bulkiyo di Desa Kemloko, Blitar. Pemerintah daerah berperan dalam pelatihan dan pendampingan, yang berdampak pada meningkatnya keterampilan masyarakat serta mendukung promosi desa wisata berbasis budaya lokal.
3. Hanggarini & Kurnia, (2022) menambahkan bahwa motif batik lokal perlu dikembangkan agar memiliki ciri khas yang kuat. Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan bentuk kolaborasi, keberadaan motif batik khas ini tidak terlepas dari dukungan dan fasilitasi pemerintah dalam menjaga warisan budaya dan menguatkan identitas lokal.
4. Nabilla Fada, (2022) meneliti kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat batik di Desa Girilayu. Meskipun bukan di Blitar, penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia mampu memperkuat pemberdayaan komunitas batik secara berkelanjutan.

5. Sri Awalia Febriana dkk. (2021) mengkaji program “Desa Batik Sehat” sebagai upaya kolaboratif antara pemerintah dan komunitas batik dalam meningkatkan kesejahteraan pengrajin melalui pendekatan sosial, lingkungan, dan kesehatan. Penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup pekerja batik.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jeng Oetari, Morinta Rosandini (2021) Innovation Design on Batik Kembang Turi, Blitar	Pemerintah daerah berkolaborasi dengan komunitas batik meresmikan <i>Desa Batik Kembang Turi</i> sebagai pusat inovasi dan pelestarian batik.	Menggambarkan peran aktif pemda dalam pengembangan industri batik Blitar melalui kolaborasi	Fokus pada desain inovasi batik sebagai strategi produksi
2	Nurul Ratnawati, I Nyoman Ruja, Agung Wiradimadja (2022) Pengembangan desain motif batik reyog bulkiyo di desa Kemloko, Blitar	Pemerintah daerah memberikan pelatihan dan pendampingan desain motif batik untuk memperkuat daya lokal wisata dan ekonomi di Blitar.	Sama-sama menyoroti pelibatan pemerintah dalam pelatihan dan penguatan komunitas batik Blitar	Fokus pada pengembangan batik sebagai bagian dari promosi desa wisata
3	Putri Pradipta Hanggraini, Panji Kurnia (2022) Pengembangan Motif Pada Batik Khas Blitar	Fokus pada pengembangan motif batik khas Blitar sebagai upaya pelestarian budaya lokal.	Menunjukkan dukungan terhadap pengembangan batik khas daerah	Tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk kolaborasi pemerintah daerah

No	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Hawa La'ala Nabilla Fada (2022) Kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat di desa Girilayu	Pemerintah daerah dan Bank Indonesia mendukung pembentukan kelompok batik dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendanaan.	Adanya kerja sama antara pemda dan komunitas batik dalam penguatan ekonomi lokal	Lokasi di luar Blitar (Girilayu), namun bisa dijadikan model pembanding kolaborasi
5	Sri Awalia Febriana, Katharina Oginawati, Ikeu Tanziha, dkk (2021) Initiating "Healthy Batik Village"	Pemerintah dan berbagai pihak melakukan intervensi sosial, kesehatan, dan lingkungan untuk memberdayakan komunitas batik dalam pendekatan holistik.	Ada kolaborasi lintas sektor yang bisa menginspirasi Blitar dalam mengembangkan desa batik sehat	Lokasi bukan di Blitar, dan fokus utama pada aspek kesehatan dan lingkungan, bukan produksi batik

Sumber : Data primer diolah oleh peneliti, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

